

MODEL PEMBANGUNAN ALTERNATIF BERBASIS MASYARAKAT PADA TAMAN NASIONAL MERU BETIRI

[ALTERNATIVE MODEL OF COMMUNITY DEVELOPMENT IN MERU BETIRI NATIONAL PARK]

Diah Puspaningrum¹⁾ dan Titin Agustina¹⁾

¹⁾Fakultas Pertanian Universitas Jember

Email: puspafauzan38@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk melakukan kajian model pengembangan masyarakat oleh Taman Nasional Meru Betiri; dan menyusun model pembangunan alternatif masyarakat desa penyangga di kawasan Taman Nasional Meru Betiri Berbasis Masyarakat. Kegiatan dilaksanakan di semua Seksi Pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri. Sumber data adalah *informance* yang terlibat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Hutan dan ekosistem di kawasan Taman Nasional Meru Betiri dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan metode pemantauan cepat yaitu *Indepth interview*, Observasi lapang, FGD melalui berbagai macam teknik pengumpulan data (*Triangulasi teknik*). Metode Analisis Data dan observasi menggunakan analisis Data Interaktif. Hasil penelitian: 1) Pemberdayaan masyarakat desa penyangga di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri dilakukan melalui tiga cara : kegiatan rehabilitasi hutan, pemberian ternak dan optimalisasi tanaman obat. Selain itu ada upaya pengembangan model desa konservasi. Strategi yang dilakukan menggunakan pendekatan *mezzo* melalui pembentukan kelompok masyarakat secara lokal seperti : SPKP, Ketan Merah, MMB, Kader Konservasi, Jacketresi melalui pemberdayaan melalui pendidikan, pelatihan dan dinamika kelompok, dan 2) Model pembangunan alternatif masyarakat desa penyangga berbasis masyarakat lokal dengan menekankan pada *capacity building*.

Kata Kunci : Model pembangunan alternatif, sumberdaya alam hutan dan ekosistem, Taman Nasional Meru Betiri.

ABSTRACT

The objective of this study was : 1) To study community development model in Meru Betiri National Park ; 2) To develop alternative development model for rural community in the border of Meru Betiri National Park. Activity was done in all Meru Betiri National Park Management Section. Source of data was information by Management of Natural Forest Resources and ecosystem in the area of Meru Betiri National Park and secondary data. Data was collected by fast monitoring method involving in-depth interview, field observation, focus group discussion with a wide range of data collection technique (triangulation techniques). Data analysis and observation method used Interactive Data Analysis. The results of study was : 1) Empowerment of rural communities in the border area of Meru Betiri National Park was done in three ways, i.e. forest rehabilitation, provision of livestock, and optimizing medicinal plants. In addition there was effort to develop model for village conservation. Strategy done used *mezzo* approach through establishment of local community group such as SPKP, Red Ketan, MMB, Conservation Volunteers, Jacketresi by means of education, training, and group dynamics; 2) Alternative development model of village community in the border area with emphasis on capacity building.

Key words : Alternative development model, natural resources and forest ecosystem, Meru Betiri National Park

PENDAHULUAN

Penduduk desa di sekitar Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani, sebagai pemilik lahan 40,67%, buruh tani 39,84%. Jenis mata pencaharian penduduk lainnya antara lain sebagai pedagang 3,7%, PNS/ABRI 1,92%, Pertukangan 1,92%, swasta 11,57%, Jasa 0,7% dan nelayan 0,24%. Tingkat penghasilan penduduk di sekitar kawasan TNMB sangat rendah dengan rata-rata Rp. 1.174.686 per tahun atau 3.218 per hari. Pendapatan ini berakibat

pada tingginya kelompok fakir miskin di kalangan masyarakat sekitar hutan karena pendapatan per harinya kurang dari US \$ 1.

Kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat di desa-desa sekitar kawasan TNMB telah dilakukan sehingga dapat mendukung upaya konservasi kawasan lindung dan pembangunan kawasan hutan. Tujuan pemberdayaan pada prinsipnya adalah: a) mengurangi tingkat ketergantungan masyarakat sekitar TNMB terhadap kawasan hutan termasuk sumberdaya hayati melalui pengembangan ekonomi di luar kawasan; b)

menambah alternatif pendapatan masyarakat di luar hutan; c) meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat desa di luar hutan. Kegiatan pemberdayaan yang diharapkan dapat : a) memantapkan kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, dengan meningkatkan peran serta masyarakat; b) mengembangkan partisipasi, desentralisasi, kemitraan, pemerataan, keberlanjutan dan kemandirian guna meningkatkan kelestarian biodiversitas kawasan konservasi; c) meningkatkan kontribusi kawasan konservasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

Letak kawasan TNMB yang berbatasan langsung dengan masyarakat sehingga terdapatnya pemukiman penduduk dan perkebunan dalam kawasan TNMB. Hal ini membawa implikasi perlunya pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan SDAHE. Disamping itu masyarakat belum sepenuhnya memahami aturan-aturan dalam pengelolaan Sumberdaya Alam Hutan dan Konservasi sehingga perlu terus dilakukan upaya-upaya sosialisasi dan penyuluhan dalam meningkatkan pemahaman dan pelebagaan aturan-aturan yang telah ada. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas peneliti tertarik melakukan penelitian yang berfokus pada pembuatan model pembangunan alternatif berbasis masyarakat guna meningkatkan peran sertanya dalam pelestarian TNMB.

BAHAN DAN METODE

Penentuan daerah penelitian melalui *purposive sampling* dengan desa-desa penyangga yang terdapat di kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Kegiatan ini dilaksanakan di semua Seksi Pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri yaitu di Seksi Wilayah I Sarongan (Rajegwesi), Seksi wilayah II (Ambulu) dan Seksi Wilayah III Kalibaru (di Kebunrejo).

Peneliti melakukan kajian pengembangan masyarakat lokal dan pemberdayaan dengan pendekatan kualitatif, yaitu ingin memahami upaya-upaya pemberdayaan yang dilakukan Taman Nasional Meru Betiri. Latar belakang pemikiran partisipasi adalah program, proyek, atau kegiatan pembangunan masyarakat yang datang dari "Atas" atau "luar" komunitas sering gagal dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Reorientasi ulang terhadap strategi pembangunan masyarakat muncul dengan lebih mengedepankan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai strategi dalam pembangunan masyarakat (Adimiharja dan Hikmat, 2003).

Sumber data dalam penelitian adalah kata-kata dan tindakan dari *key informant/stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Hutan dan ekosistem di kawasan Taman Nasional Meru Betiri (data primer) yaitu berasal dari lembaga yang terlibat langsung : Kelompok Tani Mitra Rehabilitasi (Ketan Merah), SPKP (Sentra Penyuluhan Kehutanan Desa), Pamswakarsa (Masyarakat Mitra Polhut) TNMB,

Kader Konservasi, Lembaga Pemerintah Desa. Sedangkan data sekunder didapat dari sumber tertulis, foto, dokumentasi yang diperoleh dari berbagai instansi dan lembaga yang terkait dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Hutan dan Ekosistem (SDAHE).

Metode Pemantauan cepat yang digunakan dalam research adalah : *Indepth interview*, Observasi lapang, FGD (*Focus Discussion Group*) sehingga digunakan berbagai macam teknik pengumpulan data (triangulasi teknik). FGD dibangun berdasarkan asumsi: a) Keterbatasan individu selalu tersembunyi pada ketidaktahuan kelemahan pribadi tersebut; b) Masing-masing anggota kelompok saling memberi pengetahuan satu dengan lainnya dalam pergaulan kelompok; c) Setiap individu dikontrol oleh individu lain sehingga ia berupaya menjadi yang terbaik; d) Kelemahan subyektif terletak pada kelemahan individu yang sulit dikontrol oleh individu yang bersangkutan; e) Intersubyektif selalu mendekati kebenaran yang terbaik.

Data yang dikumpulkan dalam FGD adalah :

- 1). Kajian model pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan Taman Nasional Meru Betiri
- 2). Data hasil FGD digunakan untuk menyusun model pembangunan alternative berbasis masyarakat lokal sehingga program pemberdayaan yang dilakukan lebih efektif dan keberlanjutannya dapat diharapkan.

Peserta FGD adalah key informant/stakeholder yang betul-betul terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan SDAHE dalam kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Adapun peserta FGD adalah: Kelompok Tani Mitra Rehabilitasi (Ketan Merah), SPKP (Sentra Penyuluhan Kehutanan Desa), Pamswakarsa (Masyarakat Mitra Polhut) TNMB, Kader Konservasi, Lembaga Perguruan Tinggi, LSM yang terlibat dalam pengelolaan SDAHE, Lembaga Pemerintah Desa.

Analisis data yang dikumpulkan secara *indept interview* dan observasi menggunakan analisis data interaktif dari Miles and Huberman. Menurut Sugiyono (2009) bahwa dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus-menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif) sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Untuk mengatasi kesulitan dalam melakukan analisis maka Miles dan Huberman (1992) menyarankan dalam melakukan analisis data menggunakan model interaktif. Ditambahkan pula bahwa pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Teknik analisis yang dilakukan mencakup tiga kegiatan yang bersamaan: (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan (verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Pengembangan dan Pemberdayaan terhadap Masyarakat Desa Penyangga Oleh Taman Nasional Meru Betiri

Model Pengembangan Masyarakat yang dilakukan Oleh Taman Nasional Meru Betiri

Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Warga masyarakat difasilitasi dalam proses terciptanya keadilan sosial dan saling menghargai melalui program-program pembangunan secara luas yang menghubungkan seluruh komponen masyarakat. Pengembangan masyarakat menterjemahkan nilai-nilai keterbukaan, persamaan, pertanggungjawaban, kesempatan, pilihan partisipasi, saling menguntungkan, saling timbal balik, dan pembelajaran terus-menerus. Inti dari pengembangan masyarakat adalah mendidik, membuat anggota masyarakat mampu mengerjakan sesuatu dengan memberikan kekuatan atau sarana yang diperlukan dan memberdayakan mereka.

Pengembangan masyarakat adalah komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depannya. Masyarakat lapis bawah umumnya terdiri dari orang-orang lemah, tidak berdaya dan miskin karena tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol sarana produksi. Mereka pada umumnya terdiri atas petani penggarap, petani berlahan kecil, para nelayan, masyarakat hutan, kalangan pengangguran, orang cacat, dan orang-orang yang marginal. Sesuai yang dikatakan oleh Bapak Yusak Wagimin selaku Humas SPKP Sarongan Resort Rajegwesi sebagai berikut:

“Zona lahan rehabilitasi diperuntukkan bagi masyarakat **“upang karang, upang usup”** (orang yang tidak memiliki pekarangan dengan mendirikan rumah di tanah milik orang lain dan orang yang menumpang di rumah milik orang lain/tidak memiliki rumah sendiri). Mereka diberi lahan rehabilitasi di kawasan hutan sekitar 50 Ha. Lahan tersebut ditanami jagung, kedelai, pisang”

Hal yang sama terjadi di Desa Curahnongko Kabupaten Jember. Lahan rehabilitasi dapat dikelola oleh masyarakat yang tidak memiliki lahan. Hal ini

sesuai dengan pernyataan Pak Sukowo sebagai anggota SPKP Desa Curahnongko. sebagai berikut:

“Tahun 1983 hutan gundul hanya tinggal semak belukar. Pada tahun 1985 LATIN (P kasminta, P Kirman, P Nurhadi) mendekati “orang-orang timur sawah” (etnis Madura) dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan buta huruf, arisan, dan pembuatan bedengan-bedengan. Sejumlah 7 Ha lahan percontohan dibagi untuk 40 orang sehingga per orang mendapatkan 0,125 Ha. Mereka diajak untuk mengukur lahan tersebut dan melakukan penanaman tanaman empon-empon, cabe jawa, pakem, kluwak, kuniran, kapulogo. Saat ini yang dahulu ditanam sudah menjadi hutan kembali”

Kegiatan pengembangan masyarakat difokuskan pada upaya menolong orang lemah yang berminat bekerjasama dalam kelompok, melakukan identifikasi terhadap kebutuhan dan melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan. Semua kegiatan pengembangan masyarakat diarahkan untuk membentuk struktur masyarakat yang mencerminkan tumbuhnya semangat swadaya dan partisipasi. Pengembangan masyarakat meliputi usaha memperkokoh interaksi sosial dalam masyarakat, menciptakan semangat kebersamaan, solidaritas di antara anggota masyarakat dan membantu mereka untuk berkomunikasi dengan pihak lain dengan cara berdialog secara alamiah atau tanpa intervensi, didasari penuh pemahaman dan ditindaklanjuti dengan aksi sosial nyata.

Rothman dalam Suharto, (2009), mengembangkan tiga model dalam konsep pengembangan masyarakat yaitu: 1). Pengembangan masyarakat lokal (*Locality Development*); 2). Perencanaan sosial (*Social Planning*); dan 3). Aksi Sosial (*Social Action*). Pengembangan masyarakat yang dilakukan Taman Nasional Meru Betiri merupakan model pengembangan masyarakat lokal, merupakan proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang bukan sebagai system klien yang bermasalah melainkan masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan.

Sedangkan parameter model pengembangan masyarakat lokal yang telah dilakukan oleh Taman Nasional Meru Betiri adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Aplikasi model pengembangan masyarakat lokal pada desa penyangga taman nasional meru betiri

| No | Parameter | Model Pengembangan Masyarakat Lokal | Aplikasi model |
|-----|---|---|---|
| 1. | Orientasi Tujuan | Kemandirian, integritas dan kemampuan masyarakat (proses dan tujuan) | Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa penyangga di kawasan Taman Nasional Meru Betiri |
| 2. | Asumsi mengenai Struktur masyarakat | Kurang kemampuan dalam relasi dan pemecahan masalah. | Kualitas sumberdaya manusia masih rendah serta kurangnya relasi dengan pihak terkait (<i>stakeholder</i>) dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengelola sumberdaya alam hutan dan ekosistem dalam upaya konservasi |
| 3. | Asumsi mengenai kepentingan masyarakat | Kepentingan umum atau perbedaan-perbedaan yang dapat diselenggarakan | Konservasi dalam rangka Kelestarian sumberdaya alam hutan dan ekosistem untuk kepentingan umum. Dimana masyarakat sekitar hutan ikut bertanggungjawab |
| 4. | Konsepsi mengenai kepentingan umum | <i>Rationality-unitary</i> | Sumberdaya hutan merupakan sumberdaya alam dimana kelestarian merupakan kepentingan umum. Harus ada kerjasama antar <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan untuk kelestarian hutan. |
| 5. | Orientasi terhadap struktur kekuasaan | Struktur kekuasaan sebagai kolaborator, perwakilan | Taman Nasional Meru Betiri sebagai pemegang kekuasaan dalam melakukan konservasi bertindak sebagai perwakilan dari pemerintah dalam mewujudkan kelestarian hutan |
| 6. | System Klien atau system perubahan | Masyarakat secara keseluruhan | <i>Mind set</i> dan perilaku masyarakat desa penyangga diubah dalam mengelola Sumberdaya alam hutan dan ekosistem. |
| 7. | Konsepsi mengenai klien atau penerima layanan | Warga masyarakat atau negara | Penerima layanan atau obyek yang diberdayakan adalah warga masyarakat desa penyangga dan warga Negara Indonesia |
| 8. | Peranan masyarakat | Partisipan dalam proses pemecahan masalah | Partisipasi desa penyangga dalam melakukan pengelolaan SDAHE dan konservasi dengan paradigma <i>People centered development</i> |
| 9. | Peranan Pekerja Sosial | Pemungkinan, coordinator, pembimbing | Pekerja sosial khususnya dari Lembaga Taman Nasional Meru Betiri. LSM bergerak di konservasi dan lingkungan serta <i>stakeholder</i> lain (Perguruan Tinggi), pihak swasta yang peduli terhadap lingkungan |
| 10. | Media Perubahan | Mobilisasi Kelompok-kelompok kecil | Pembentukan kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga yang berperan dalam pengelolaan SDAHE seperti SPKP, Ketan Merah, Kader Konservasi, MMP |
| 11. | Strategi Perubahan | Pelibatan masyarakat dalam pemecahan masalah | Pelibatan masyarakat desa penyangga di kawasan Taman Nasional Meru Betiri |
| 12. | Teknik Perubahan | Konsensus dan diskusi kelompok, partisipasi, <i>brain storming</i> , <i>role playing</i> , bimbingan dan penyuluhan | Pelatihan-pelatihan pengelolaan SDA dan kewirausahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa penyangga Taman Nasional Meru Betiri (penggunaan strategi mezzo melalui pembentukan kelompok) |

Sumber : Adopsi dari Suharto 1997 untuk aplikasi Pengembangan Masyarakat Desa Penyangga Taman Nasional Meru Betiri

Analisis Jaringan Sumber Masyarakat Desa Penyangga

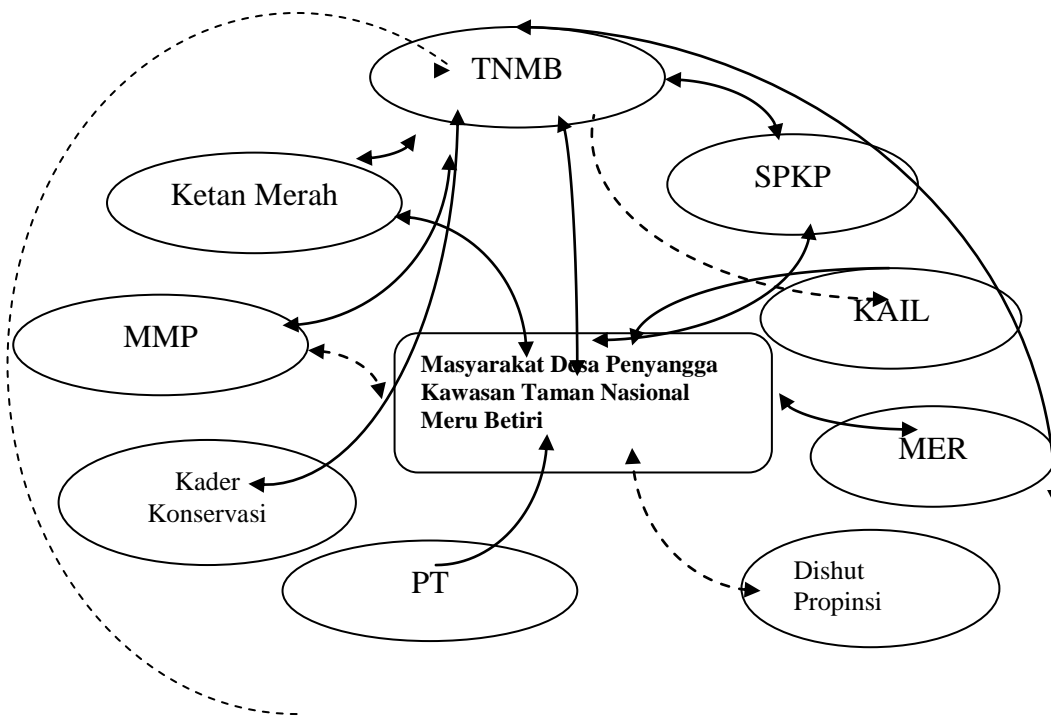
Menurut Suharto (2009) untuk melihat kekuatan yang dimiliki masyarakat desa penyangga dalam upaya memecahkan masalah dan pemenuhan kebutuhan perlu dilakukan Analisis Jaringan Sumber (AJS) atau *Resource Network Analysis* (RNA). Analisis Jaringan Sumber merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk melakukan pemetaan dan

pengukuran hubungan dan interaksi berbagai sumber dalam satu kesatuan entitas sosial (lembaga atau masyarakat) yang melibatkan kelompok masyarakat ataupun lembaga-lembaga baik formal maupun informal yang digambarkan dengan lingkaran-lingkaran. Garis yang menghubungkan lingkaran menunjukkan keterkaitan lembaga-lembaga yang bersangkutan. Segenap jalinan interaksi beserta dinamika dan keberfungsian di antara lembaga-

lembaga disebut jaringan (*network*). Pendekatan untuk menggambarkan dan mengidentifikasi kualitas jaringan. Hasil Analisis Jaringan Sumber berdasarkan teknik FGD dan *indepth interview* dari beberapa *key informant* digambarkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Akan ditransformasikan ke dalam Matriks Analisis Jaringan Sumber (AJS). Analisis

Jaringan Sumber (AJS) dirancang untuk memetakan dinamika interaksi antar sumber internal dan eksternal yang terkait dengan masyarakat sasaran yaitu masyarakat desa penyangga di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri, sehingga dapat dibuat sebuah rencana intervensi guna keberfungsian sosial masyarakat Desa Penyangga.



Gambar 1. Peta Analisis Jaringan Sumber Masyarakat Desa Penyangga dengan *Stakeholder* (lembaga-lembaga yang terkait dengan konservasi dan pengelolaan lingkungan SDAHE)

Beberapa unsur pokok yang terkait dalam matriks Analisis Jaringan Sosial (AJS) yaitu:

1. **Jenis dan kualitas sumber** yaitu manfaat yang diperoleh dari kelompok-kelompok atau lembaga tersebut dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa penyangga;
2. **Aksesibilitas** merupakan kelompok yang paling sering diakses oleh masyarakat desa penyangga, kontribusi dan keterlibatan kelompok dan hambatan yang dialami masyarakat desa penyangga.
3. **Interaksi antar sumber** yaitu hubungan antara kelompok/lembaga yang ada (kuat, lemah atau

sedang) serta bentuk interaksi (kerjasama atau persaingan) yang terjadi.

Matriks Analisis Jaringan Sumber hanya memetakan antara obyek/ masyarakat sasaran dengan lingkungan eksternalnya (kelompok/lembaga) yang terkait. Sedangkan hubungan antara kelompok/lembaga belum terpetakan. Berdasarkan Gambar Peta Analisis Jaringan Sumber Masyarakat Desa Penyangga dapat diketahui bahwa kelompok/lembaga yang memang dibentuk oleh TNMB dalam kerangka kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat telah memiliki hubungan timbal balik.

Tabel 2. Matriks Analisis Jaringan Sumber (AJS) Masyarakat Desa Penyangga

| No | Nama Lembaga | Jenis dan Kualitas Sumber | Aksesibilitas Sumber | Interaksi Sumber |
|----|----------------------------|---|--|--|
| 1. | Taman Nasional Meru Betiri | Pemberdayaan terhadap masyarakat desa penyangga, Pembentukan lembaga masyarakat lokal, Pelatihan-pelatihan, Bantuan alat, pendampingan | Mudah mengakses tetapi bantuan berupa badgeter disesuaikan anggaran TNMB, Keterbatasan SDM TNMB dalam melakukan pendampingan | Kuat (bersifat timbal balik) |
| 2. | Ketan Merah | Merupakan lembaga lokal yang dibentuk oleh TNMB untuk mengelola lahan rehabilitasi dengan norma-norma yang telah ditentukan. | Tidak semua masyarakat desa penyangga mengelola lahan rehabilitasi sehingga tidak semua desa penyangga di kawasan TNMB dibentuk lembaga ini | Sedang (bersifat timbal balik) |
| 3. | SPKP | Merupakan lembaga lokal yang dibentuk di masyarakat desa penyangga dengan tujuan mengembangkan penyuluh swadaya, mengembangkan kelompok masyarakat yang produktif mandiri, meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa penyangga | Hampir seluruh desa penyangga terdapat lembaga ini hanya saja dinamika masing-masing lembaga berbeda antara satu dengan yang lain. | Di beberapa desa kuat seperti di Curahnongko tetapi di Desa Kandangan dan sarongan sedang dan di Kebunrejo lemah (bersifat timbal balik) |
| 4. | MMB | Merupakan lembaga yang dibentuk oleh TNMB sebagai mitra polhut dalam pengamanan hutan | MMB merupakan lembaga yang melakukan control terhadap kegiatan masyarakat di sekitar hutan dan juga melakukan tindakan preventif dengan memberikan penyuluhan (sekolah-sekolah yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan) secara periodik. Hampir dimiliki seluruh desa penyangga. | Sedang (bersifat timbal balik) |
| 5. | Kader Konservasi | Merupakan lembaga yang dibentuk secara lokal oleh TNMB | Kader konservasi dimiliki oleh masyarakat desa penyangga yang bertujuan mensosialisasikan pentingnya konservasi pada masyarakat | Sedang (bersifat timbal-balik) |
| 6. | MER | Merupakan lembaga local yang dibentuk oleh TNMB untuk kepentingan ekowisata di Resort Rajegwesi. Dibekali dengan ketrampilan yang berhubungan dengan wisata. | Mampu melibatkan masyarakat terutama pemuda pengangguran untuk mengelola kawasan wisata teluk hijau dan Sukamade | Lemah. (bersifat timbal balik karena sebagian keuntungan dari wisata dipergunakan untuk khitan missal) |
| 7. | KAIL | Merupakan LSM yang bergerak dalam bidang konservasi. Terdapat di Desa Curahnongko. Banyak memberikan penyadaran kepada masyarakat terkait pentingnya konservasi dan memiliki kartu pintar sebagai insentif bagi petani lahan rehab yang dapat memelihara tanaman pokok dengan baik | Tidak semua warga masyarakat dapat mengakses kartu pintar karena keterbatasan dana | Kuat (bersifat timbal balik) |
| 8. | Perguruan Tinggi | Merupakan lembaga yang mengembangkan teknologi dengan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Khususnya masyarakat desa penyangga. | Masyarakat masih sulit mengakses lembaga PT karena minimnya fasilitas. Sudah terdapat beberapa penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh beberapa dosen baik secara berkelompok maupun mandiri tetapi masih bersifat parsial | Lemah (searah) |
| 9. | Dinas Kehutanan Propinsi | Lembaga pemerintah yang memberikan bantuan di beberapa desa seperti Desa Curahnongko dalam bentuk bantuan bibit empon-empon dan alat untuk pembuatan kripik nangka. Di Wonoasri memberikan bantuan empon-empon dan biogas terhadap KMDH | Masyarakat desa penyangga merupakan warga yang bermukim disekitar kawasan hutan. Hanya beberapa kelompok yang memiliki akses kepada lembaga pemerintah khususnya Dinas Kehutanan Propinsi. Sebenarnya yang paling dekat adalah Disbunhut Kabupaten Jember | Lemah (timbal balik) |

Sumber : Data Primer Diolah, 2013

Sedangkan lembaga-lembaga yang independen (LSM), lembaga pemerintah dan Perguruan Tinggi belum memiliki hubungan timbal balik. Interaksi antara LSM, Lembaga Pemerintah dan Perguruan tinggi masih sangat lemah. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dodit terkait koordinasi dan hubungan antar lembaga terhadap masyarakat desa penyangga tersebut.

Untuk mempertahankan kelestarian hutan perlu dukungan masyarakat sekitar hutan. Juga dukungan dari berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder), karena masih ada ego sektoral. Pada prinsipnya harus ada sinergi dari stakeholder. Terutama perguruan tinggi (Universitas Jember). Pada prinsipnya pemberdayaan yang diberikan dan dukungan financial untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak boleh hilang atau “muspro” (hilang sia-sia, **red**) sehingga perlu ada evaluasi dan harus bergulir. Pelatihan-pelatihan yang telah diberikan tidak boleh berhenti dalam taraf teori tetapi harus bisa diadopsi oleh masyarakat. Taman nasional Meru Betiri sangat terbuka dengan adanya pelatihan-pelatihan yang dapat diberikan oleh stakeholder.

Pemberdayaan Masyarakat Desa Penyangga di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri

Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan Taman Nasional Meru Betiri dimulai sejak tahun 1995. Program pemberdayaan di TNMB dilakukan melalui tiga cara yaitu:

1. Kegiatan Rehabilitasi Hutan
Rehabilitasi hutan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan petani lewat mekanisme *Social Forestry*. Petani mengolah lahan pada area rehabilitasi dengan menanam dan memelihara tanaman pokok, serta diperbolehkan menanam tanaman tumpangsari sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh TN Meru Betiri. Pola ini mengakibatkan petani mendapatkan hasil dari tanaman pokok dan hasil panen tanaman tumpangsari.
2. Pemberian Ternak
Pola pemberdayaan masyarakat lewat bantuan ternak pada prinsipnya dilakukan guna mengatasi masalah utama di tingkat usahatani yaitu keterbatasan modal peternak, lemahnya organisasi usaha dan jejaring kerja. Pada tahun 1995-2000, bantuan ternak yang diberikan yaitu kambing, ayam, domba, dan sapi dengan harapan hewan ternak bisa berkembang biak dan masyarakat dapat menjalankan sistem modal bergulir.
3. Optimalisasi Tanaman Obat
Tanaman obat adalah salah satu potensi yang dimiliki TNMB dan masyarakat telah

memanfaatkan tanaman tersebut sejak lama. Beberapa Desa seperti Andongrejo dan Curahnongko, berpotensi untuk diarahkan sebagai sentra industri jamu berbasis tanaman obat TNMB. Pemberian bantuan modal kepada kelompok TOGA (Pengolah Tanaman Obat Keluarga) cukup menunjang dalam meningkatkan produk jamu tradisional.

Pengembangan Model Desa Konservasi

Pada Tahun 2011, kegiatan pemberdayaan masyarakat di Taman Nasional Meru Betiri difokuskan pada kegiatan pengembangan Model Desa Konservasi, dilaksanakan di semua Seksi Pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri yaitu di Seksi Wilayah I Sarongan (Rajegwesi), Seksi wilayah II Ambulu (Wonoasri, Andongrejo, dan Curahnongko) dan Seksi Wilayah III Kalibaru (di Kebunrejo). Kegiatan ini terdiri dari pembinaan/penguatan kelompok masyarakat, penguatan kapasitas masyarakat dan pembentukan usaha kelompok.

1. Pembentukan/Pembinaan Kelembagaan Kelompok Masyarakat

Beberapa desa di sekitar TNMB sudah membentuk kelompok masyarakat yang mewadahi kegiatan di masing-masing desa, antara lain di Desa Curahnongko mempunyai SPKP (Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan), kelompok masyarakat yang dibentuk pada tahun 2010. Desa Wonoasri memiliki LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan Konservasi) Wonomulyo, dibentuk pada tahun 1992. Desa Andongrejo sudah membentuk Kelompok Tani Mekar Jaya di awal tahun 1990.

2. Penguatan Kapasitas Masyarakat

Penguatan kapasitas masyarakat dilakukan dengan memberikan ketrampilan kepada masyarakat sekitar hutan berupa ketrampilan untuk memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang tersedia di sekitarnya. Pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan adalah: pelatihan budidaya jamur tiram. Pelatihan pembuatan pakan ternak alternatif, pelatihan pembuatan bokashi, pelatihan budidaya empon-empon, pelatihan budidaya lele organik, sosialisasi model desa konservasi, pelatihan PRA (*Participatory Rural Appraisal*), pelatihan pemandu wisata. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Taman Nasional Meru Betiri menggunakan strategi pembentukan kelompok. Kelompok-kelompok tersebut merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk pengelolaan sumberdaya alam hutan dan ekosistem (SDAHE). Secara lebih detail disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Lembaga Pengelola Sumberdaya Alam Hutan dan Ekosistem di Taman Nasional Meru Betiri beserta Programnya

| No | Nama Desa | Lembaga pengelola SDAHE | Program Yang Dilaksanakan |
|----|-----------------------------------|-------------------------|---|
| 1. | Curahnongko (Kabupaten Jember) | SPKP | Pengolahan tanaman obat menjadi jamu, budidaya jamur, budidaya cacing, budidaya belut, pembuatan kripik singkong dan kripik pisang. Program yang sedang direncanakan yaitu pembuatan kripik jamur |
| | | LSM (KAIL) | Program kesehatan swadaya diejawantahkan melalui pengembangan kelompok TOGA (tanaman obat keluarga), yang merupakan mata rantai dari program kegiatan rehabilitasi tanaman obat sebagai antisipasi pasca panen. |
| | | | Program rintisan ekotourisme, potensi kawasan rehabilitasi di TN Meru Betiri yang demikian eksotik dan kaya tumbuhan obatnya memberikan inspirasi kelompok-kelompok rehabilitasi untuk didesign menjadi sebuah ekowisata MEE (Medical, Education dan Ecotourism). |
| | | MMP | Merupakan lembaga mitra Polisi hutan yang melakukan upaya preventif terhadap keamanan hutan konservasi |
| | | Ketan Merah | Mengelola lahan rehabilitasi di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Menanam tanaman pokok yang telah ditentukan oleh TNMB dan juga tanaman sela dengan cara tumpangsari. |
| | | JaketResi | Penanaman tanaman pokok di lahan rehabilitasi, keamanan lahan, simpan pinjam, dan membahas proyek apabila ada bantuan dari TN Meru Betiri maupun KAIL. Modal simpan pinjam yaitu dari tabungan petani sebesar dua puluh ribu rupiah setiap kali pertemuan. Pengembalian pinjaman setiap panen, tiga bulan sekali. Apabila ada bantuan atau proyek dari TN Meru Betiri maupun KAIL diberikan secara bergantian kepada setiap kelompok tani untuk mengelolanya. Pelaksana proyek terdiri dari dua atau tiga kelompok tani |
| 2. | Desa Kebun rejo (Kab. Banyuwangi) | SPKP | Budidaya Jamur tiram dan lele organik |
| | | MMP | Menjaga kelestarian hutan dengan cara preventif maupun kuratif. Melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang dekat dengan kawasan Taman Nasional |
| 3. | Desa Kandangan | SPKP | Pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan manajemen usaha pengurus, pelatihan ketrampilan untuk anggota SPKP (pembuatan souvenir, budidaya jamur, pembuatan pupuk organik dan minyak kelapa). Melakukan upaya konservasi kawasan Taman Nasional Meru Betiri |
| 4. | Desa Sarongan | SPKP | Pelatihan SPKP yaitu pembuatan kompos, membuat ketrampilan dari batok kelapa, pelatihan budidaya lele organik (SPKP Rajegwesi). |
| | | MER | Mengembangkan ecowisata di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Pelatihan pemandu wisata, pelatihan pengelolaan homestay. Pengurangan pengangguran dengan melibatkan pemuda untuk usaha jasa parkir di tempat wisata. |

Sumber : Data Primer Diolah, 2013

Strategi pemberdayaan yang ditujukan kepada kelompok adalah strategi *mezzo* dimana sasarannya adalah kelompok, *Peer Group*, *Self help group*. Teknik yang dilakukan untuk melakukan pemberdayaan adalah melalui pendidikan, pelatihan dan dinamika kelompok. Tujuan pemberdayaan adalah peningkatan kesadaran,

pengetahuan, ketrampilan, serta perubahan sikap agar dapat mengatasi masalah sendiri dan kelompok.

Model Pembangunan Alternatif Masyarakat Desa Penyangga di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri yang Berbasis Masyarakat

Skema program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat merupakan suatu model pembangunan alternatif. Gagasan pembangunan alternative muncul dalam diskursus pembangunan sebagai reaksi terhadap kegagalan model pembangunan pro pertumbuhan ekonomi dalam mengatasi problem kemiskinan, memerhatikan kelestarian lingkungan serta memecahkan aneka problem sosial yang menghimpit masyarakat (Zubaedi, 2013)

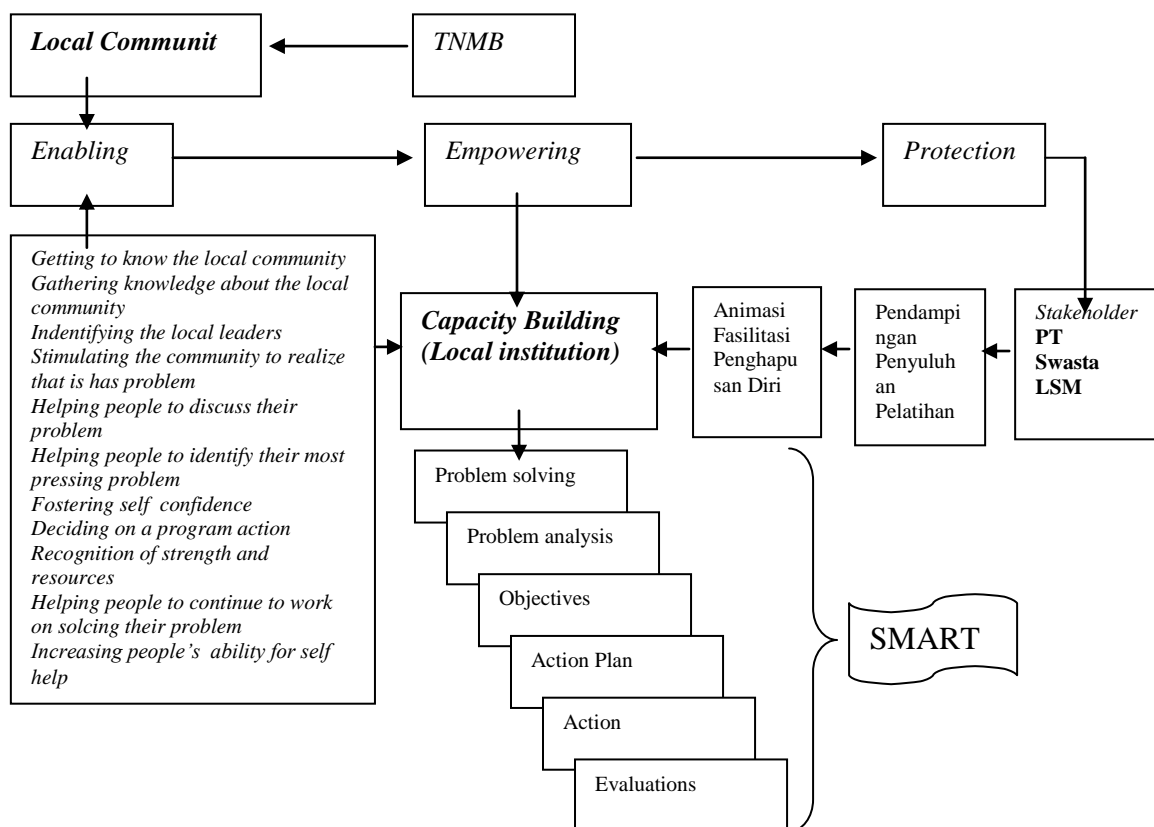
Pada dasarnya inti dari kegiatan pemberdayaan adalah adanya partisipasi dari masyarakat sebagai pelaku atau subyek dari pembangunan (*People centered development*). Kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak yang memandang partisipasi masyarakat semata-mata hanya sebagai penyampaian informasi (*public information*), penyuluhan, bahkan sekedar *public relation* agar proyek tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Partisipasi masyarakat tidak saja digunakan sebagai sarana mencapai tujuan, tetapi juga digunakan sebagai tujuan (*participation is an end itself*).

Berdasarkan hasil Analisis Jaringan Sumber (AJS) pada masyarakat desa penyangga di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat lokal memiliki potensi-potensi sosial budaya, pengetahuan dan proses local yang dapat dikembangkan kapasitasnya untuk mencapai tujuan pembangunan pada umumnya dan kelestarian hutan serta kesejahteraan pada khususnya. Interaksi antar lembaga yang bersifat lokal sudah memiliki hubungan timbal balik secara lemah sampai kuat dengan Taman Nasional Meru Betiri sebagai otoritas pengelola kawasan konservasi. Lembaga swadaya Masyarakat, fokus pada kelestarian lingkungan seperti KAIL memiliki hubungan kuat dan bersifat timbal balik dengan Taman Nasional Meru Betiri. Perguruan Tinggi

terutama Universitas Jember belum memiliki interaksi yang kuat karena kerjasama baik dalam kegiatan penelitian maupun pengabdian terbatas pada kegiatan secara individual belum dilakukan antar lembaga.

Menurut Maskun (1999) dalam Fachrudin (2010) bahwa pengembangan kapasitas merupakan suatu pendekatan pembangunan yang berbasis pada kekuatan-kekuatan dari bawah (lokal) secara nyata. Kekuatan-kekuatan itu adalah kekuatan sumberdaya alam, sumberdaya ekonomi, dan sumberdaya manusia sehingga menjadi kapasitas local yang merupakan kapasitas pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan swasta, Perguruan Tinggi (PT) dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan potensi alam dan ekonomi masyarakat lokal. Kelembagaan lokal seperti Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP), Kelompok Tani Mitra Rehabilitasi (Ketan Merah), Kader Konservasi, MMP, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (MER, KAIL) memiliki kebebasan untuk menentukan kebutuhan organisasinya serta kebutuhan masyarakat dalam rangka konservasi dan peningkatan kesejahteraan. Perlu ditingkatkan peran serta (keterlibatan) dari lembaga-lembaga pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dalam proses pemampuan (*enabling*), pemberdayaan (*empowering*) dan perlindungan (*protection*) terhadap proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis masyarakat lokal. Proses ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Taman Nasional Meru Betiri sebagai otoritas pengelola SDAHE di Taman Nasional Meru Betiri.

Model pembangunan alternatif masyarakat desa penyangga di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri berbasis masyarakat dapat digambarkan seperti dibawah ini:



Gambar 2. Model Pembangunan Alternatif Masyarakat Desa Penyangga di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri yang Berbasis Masyarakat

Model pembangunan alternatif di Taman Nasional Meru Betiri seharusnya menekankan pentingnya pembangunan yang berbasis masyarakat (*Community Based Development*), yang berparadigma *bottom up* dan lokalitas. Model pembangunan ini didasari oleh upaya untuk mengembangkan dan mendorong struktur masyarakat desa penyangga agar menjadi lebih berdaya melalui regulasi yang berpijak pada prinsip keadilan. Pendekatan yang dipakai dalam model ini adalah pembangunan tingkat lokal dengan menyertakan partisipasi orang-orang local, sehingga orang lokal dapat mejadi subyek pembangunan di masyarakatnya sendiri dengan tetap menjaga nilai-nilai budaya yang telah ada dan berakar di masyarakat desa penyangga, struktur sosial masyarakat lokal, serta budaya dan tradisi masyarakat lokal desa penyangga.

Konsep pembangunan alternative memerlukan pengetahuan tentang masyarakat lokal, bekerja bersama mereka serta mengidentifikasi sumberdaya-sumberdaya lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa penyangga di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Identifikasi sumberdaya lokal termasuk modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Membantu mereka memahami masalah-masalah yang dihadapi serta memfasilitasi kebutuhan masyarakat lokal dalam meningkatkan kesejahteraan. Proses fasilitasi dan pendampingan tidak selamanya dilakukan karena pada saatnya masyarakat dianggap telah mempunyai kepercayaan diri yang

cukup sehingga sedikit demi sedikit fasilitasi harus dihapuskan. Untuk menjadi subyek baru dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat lokal harus mampu membantu dirinya sendiri dalam menentukan permasalahan yang dihadapi serta bagaimana solusi yang terbaik sehingga tujuan masyarakat dapat tercapai.

Memberdayakan suatu komunitas mengandung makna: 1) *authority*, yaitu bahwa pemberdayaan membawa konotasi pemberian wewenang lebih luas kepada komunitas tertentu; dan 2) *Capacity*, yang bermakna sebagai energy, artinya pemberdayaan bermakna sebagai “pemberian energy” dari pihak yang kuat kepada komunitas yang lemah. Program pengembangan masyarakat umumnya menekankan penerapan CBM (*Community-Based Management/* manajemen berbasis masyarakat) yaitu pendekatan pengelolaan program yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat lokal sebagai dasarnya. CBM merupakan suatu strategi untuk mewujudkan praktik pembangunan yang berpusat pada manusia, dimana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumber daya hutan di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri secara berkelanjutan berada di masyarakat desa penyangga. CMB membawa konsekuensi bagi masyarakat untuk memiliki kesempatan dan tanggungjawab dalam melakukan pengelolaan terhadap Sumberdaya Alam Hutan dan

Ekosistem (SDAHE) di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Masyarakat desa penyangga yang menentukan dan mendefinisikan kebutuhan, tujuan, aspirasi dan membuat keputusan untuk kesejahteraannya tetapi masih dalam kerangka konservasi dan keberlanjutan.

Penyusunan kegiatan pengembangan dilakukan dengan beberapa langkah yaitu:

1. Tahap *problem posing* (pemaparan masalah) yang dilakukan untuk menentukan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat desa penyangga;
2. Tahap *problem analysis* (analisis masalah) mengumpulkan informasi yang dihadapi masyarakat sekitar hutan dan informasi tersebut dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan;
3. Tahap penentuan tujuan (*aims*) dan sasaran (*objectives*) yang menunjuk pada tujuan jangka panjang, dimana seluruh masyarakat desa penyangga terlibat aktif dalam program untuk mempertahankan konservasi dan kelestarian SDAHE serta meningkatkan kesejahteraannya;
4. Tahap *action plans* (perencanaan tindakan) yaitu tahap yang dilakukan oleh masyarakat desa penyangga untuk mencapai tujuan konservasi dan kelestarian SDAHE dengan memperhatikan sumberdaya atau kekuatan potensi lokal;
5. Tahap *Action* (pelaksanaan) yaitu mengimplementasikan *actions plans* yang telah ditentukan/dirancang oleh masyarakat desa penyangga serta dituntut untuk memperhatikan dampak yang mungkin timbul;
6. Tahap *evaluation* (evaluasi) yaitu tahap yang dilakukan secara terus-menerus dalam proses pengembangan masyarakat desa penyangga baik secara informal maupun formal dalam setiap bulan bahkan tahunan.

Program pengembangan masyarakat desa penyangga diusahakan memenuhi criteria SMART yaitu *simple* (mudah dipahami), *measurable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *realistic* (mungkin dikerjakan sesuai sumberdaya lokal) dan *time related* (dapat dikerjakan sesuai waktu yang tersedia).

Pengembangan kapasitas dipahami sebagai suatu proses peningkatan atau perubahan perilaku individu, organisasi, dan system masyarakat desa penyangga di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien; yaitu strategi untuk meningkatkan daya dukung kelembagaan dalam mengantisipasi masalah dan kebutuhan yang dihadapi. Adapun strategi pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat desa penyangga di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri dapat dikaji melalui dimensi-dimensi kultural, struktural dan interaksional. Dimensi cultural meliputi sistem nilai, etika dan norma yang ada; dimensi structural berkaitan dengan keberadaan kelembagaan sebagai medium untuk melakukan pemberdayaan (peningkatan kapasitas individu dan kelompok); dimensi interaksional berkaitan dengan kelembagaan yang mampu mengembangkan jejaring sosial (*networking*) demi kemajuan individu maupun

komunitas lokal masyarakat desa penyangga di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri.

KESIMPULAN

1. Model Pengembangan masyarakat yang dilakukan terhadap masyarakat desa penyangga adalah pengembangan masyarakat lokal. Parameter yang digunakan adalah orientasi tujuan, asumsi mengenai struktur masyarakat, asumsi mengenai kepentingan masyarakat, konsepsi mengenai kepentingan umum, orientasi terhadap struktur kekuasaan, sistem klien atau sistem perubahan, konsepsi mengenai klien atau penerima layanan, peranan masyarakat, peranan pekerja sosial, media perubahan, strategi perubahan, teknik perubahan. Menurut hasil Peta Analisis Jaringan Sumber (AJS) bahwa kelompok/lembaga yang memang dibentuk oleh TNMB dalam kerangka kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat telah memiliki hubungan timbal balik. Lembaga-lembaga independen (LSM), lembaga pemerintah dan Perguruan Tinggi belum memiliki hubungan timbal balik. Interaksi antara LSM, Lembaga Pemerintah dan Perguruan tinggi masih sangat lemah. Pemberdayaan masyarakat desa penyangga di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri dilakukan melalui tiga cara yaitu: kegiatan rehabilitasi hutan, pemberian ternak dan optimalisasi tanaman obat serta terdapat upaya pengembangan model desa konservasi. Strategi yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan *mezzo* melalui pembentukan kelompok masyarakat secara lokal seperti: SPKP, Ketan Merah, MMB, Kader Konservasi, Jaketresi. Strategi pemberdayaan yang ditujukan kepada kelompok adalah strategi *mezzo* dengan sasaran kelompok, *Peer Group*, *Self help group*. Teknik yang dilakukan adalah melalui pendidikan, pelatihan dan dinamika kelompok. Tujuan dari pemberdayaan adalah peningkatan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan, serta perubahan sikap agar dapat mengatasi masalah sendiri dan kelompok.
2. Model pembangunan alternatif masyarakat desa penyangga berbasis masyarakat adalah dengan menekankan pada *capacity building*. Kapasitas lokal yang dimaksud adalah kapasitas pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan swasta, Perguruan Tinggi (PT) dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan potensi alam dan ekonomi masyarakat lokal. Kelembagaan lokal seperti Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP), Kelompok Tani Mitra Rehabilitasi (Ketan Merah), Kader Konservasi, MMP, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (MER, KAIL) memiliki kebebasan untuk menentukan kebutuhan organisasinya serta kebutuhan masyarakat dalam rangka konservasi dan peningkatan kesejahteraannya.

SARAN-SARAN

1. Penguatan kelembagaan masyarakat lokal yang telah dibentuk oleh Taman Nasional Meru Betiri (SPKP, Ketan Merah, MMB) harus terus dilakukan sehingga terjadi keberlanjutan dalam pengelolaan Sumberdaya Alam Hutan dan Ekosistem.
2. Peningkatan modal sosial merupakan suatu upaya strategis bagi Taman Nasional Meru Betiri terhadap masyarakat desa penyangga yang dapat dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Hal ini berarti setiap masyarakat desa penyangga selalu diikutsertakan dalam merencanakan, melaksanakan, menikmati dan melestarikan program.
3. Koordinasi dengan berbagai *stakeholder* yang memiliki kepentingan dalam kelestarian sumberdaya alam dan konservasi harus terus dilakukan agar terjadi suatu sinergi dalam melakukan pengelolaan sumberdaya alam hutan dan ekosistem serta dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2012. Buku Informasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Taman Nasional Meru Betiri. Taman Nasional Meru Betiri. Jember.
- Anonim. Rekapitulasi Data Pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri 2005-2010. Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Balai Taman Nasional Meru Betiri. Jember.
- Anonim. Rencana Strategis Balai Taman Nasional Meru Betiri 2010-2014. Taman Nasional Meru Betiri. Jember.
- Adimihardja, Kusnaka dan Hikmat, Harry. 2003. Participatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Humaniora. Bandung.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Rineka Cipta. Jakarta.
- Fahrudin, Adi. (2010). Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat. Humaniora. Bandung.
- Hikmat, Harry. 2010. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Humaniora. Bandung.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. Analisa Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Suharto, Edi. 2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Refika Aditama. Bandung.
- Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung.
- Zubaedi. 2013. Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktek. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.